

# **SKRIPSI**

## **PENGARUH AUDIT INTERNAL, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PT PLN (PERSERO) UIP SULAWESI**

**FHADLY RAHIM**

**A031191143**



**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

# SKRIPSI

## **PENGARUH AUDIT INTERNAL, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PT PLN (PERSERO) UIP SULAWESI**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh

**FHADLY RAHIM**

**A031191143**



Kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

# SKRIPSI

## PENGARUH AUDIT INTERNAL, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT PLN (PERSERO) UIP SULAWESI

disusun dan diajukan oleh

**FHADLY RAHIM**

**A031191143**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Makassar, 4 Januari 2024

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. Anfuddin, SE., Ak., M.Si., CA.  
NIP 19640609 199203 1 003

Pembimbing Pendamping



Dr. Nadhirah Nagu, SE., Ak., M.Si., CA., CSRS., CSRA.  
NIP 19740206 200812 2 001



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA  
NIP 19650307 199403 1 003

# SKRIPSI

## PENGARUH AUDIT INTERNAL, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT PLN (PERSERO) UIP SULAWESI

disusun dan diajukan oleh





**FHADLY RAHIM**

**A031191143**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal 28 Maret 2024 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H. Arifuddin, SE., Ak., M.Si., CA.	Ketua	
2	Dr. Nadhirah Nagu, SE., Ak., M.Si., CA., CSRS., CSRA.	Sekretaris	
3	Dr. H. Amiruddin, SE., Ak., M.Si., CA., CPA	Anggota	
4	Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM	Anggota	



Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasjid, S.E., M.Si., Ak., ACPA  
NIP 19650307 199403 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Fhadly Rahim

NIM : A031191143

Jurusan/Program Studi : Akuntansi/Strata I

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

### **PENGARUH AUDIT INTERNAL, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT PLN (PERSERO) UIP SULAWESI**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 4 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Fhadly Rahim

## PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang disusun dan diajukan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program Strata I Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti sadar dengan sangat bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Olehnya itu, besar harapan peneliti agar kiranya saran dan masukan yang bersifat membangun dan positif terhadap skripsi ini guna menunjang manfaat yang diharapkan dalam skripsi ini.

Selama proses penyusunan skripsi ini, peneliti banyak menerima dukungan, saran, dan semangat dari berbagai pihak. Olehnya itu, dengan ketulusan dan kerendahan hati melalui kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Arman Rahim dan Mitha yang selama ini telah banyak memberikan dukungan, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini, serta ucapan istimewa bagi saudari peneliti; Fhilda dan Fheni yang telah memberikan dukungan dan perhatian kepada penulis.
2. Dosen pembimbing I, bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, SE., Ak., M.Si., CA. dan dosen pembimbing II sekaligus pembimbing akademik, ibu Dr. Nadhirah Nagu, SE., Ak., M.Si., CA., CSRS., CSRA. yang telah memberikan bantuan baik waktu, saran dan ilmu yang bermanfaat kepada peneliti selama proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga ibu dan bapak senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam segala niat baik yang dikerjakan.

3. Dosen penguji I, bapak Dr. H. Amiruddin, SE., Ak., M.Si., CA., CPA dan dosen penguji II bapak Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM, banyak ilmu dan masukan dari beliau ketika menguji skripsi peneliti sehingga menjadikan skripsi ini lebih baik. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam segala niat baik yang dikerjakan.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah mengajarkan ilmu dan pengetahuan berharga selama peneliti menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
5. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin serta Departemen Akuntansi yang banyak membantu serta memberikan pelayanan terbaik selama masa perkuliahan peneliti.
6. Teman-teman yaitu Leonel, Ervin, Nana, Akbar, Rein, Dhika, Risaldi, Noer, Aul, Eri, Rani, Joen, Recky, Feri, Nisa, kak Milda, Kiaa dll atas kebersamaan, dukungan, wadah berbagi keluh kesal dan kesempatan belajar bersama serta kesempatan untuk berdiskusi banyak hal selama masa kuliah.
7. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (IMA FEB-UH) yang telah menjadi wadah belajar bersama sejak masa pengaderan hingga saat ini.
8. Teman-teman Akuntansi 2019 "19NITE" dan rekan-rekan asisten dosen yang telah menemani dan berbagi canda tawa bersama selama masa perkuliahan hingga berakhirnya masa studi peneliti.
9. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan serta dukungan secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, dengan penuh rasa syukur, peneliti mendoakan semoga selalu terjaga dalam kebaikan, segala kebaikan yang telah diberikan dapat dibalas lebih lagi oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu dimudahkan setiap hal baik yang diupayakan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak, baik itu dalam menunjang keilmuan maupun sebagai bahan pertimbangan pihak yang membutuhkan. Sekian, terima kasih.

Makassar, 4 Januari 2024

Peneliti



## ABSTRAK

### **Pengaruh Audit Internal, Sistem Pengendalian Internal, dan Komite Audit Terhadap Penerapan Good Corporate Governance pada PT PLN (Persero) UIP Sulawesi)**

#### ***The Effect of Internal Audit, Internal Control System, and Audit Committee on the Implementation of Good Corporate Governance PLN (Persero) UIP Sulawesi Corp.***

Fhadly Rahim  
Arifuddin  
Nadhirah Nagu

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah audit internal, sistem pengendalian internal, dan komite audit berpengaruh terhadap penerapan *Good Corporate Governance* pada PT PLN (Persero) UIP Sulawesi secara parsial. Penelitian ini menggunakan desain studi korelasional dengan instrumen kuesioner sebagai alat untuk mengukur variabel. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier berganda, analisis ini didasarkan pada data dari 93 responden yang telah melengkapi seluruh pernyataan dalam kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa audit internal, sistem pengendalian internal, dan komite audit secara parsial berpengaruh terhadap penerapan *Good Corporate Governance* pada PT PLN (Persero) UIP Sulawesi. Dari ketiga variabel yang memengaruhi penerapan *Good Corporate Governance* pada PT PLN (Persero) UIP Sulawesi, variabel audit internal, sistem pengendalian internal, dan komite audit berpengaruh positif.

**Kata Kunci:** audit internal, sistem pengendalian internal, komite audit, *good corporate governance*

*This study aims to determine whether internal audit, internal control system and audit committee affect the implementation of Good Corporate Governance at PT PLN (Persero) UIP Sulawesi partially. This study used a correlational study design with a questionnaire instrument as a tool for measuring variables. The method of analysis was used to test the hypothesis is multiple linear regression, where analysis is based on data from 93 respondents who have completed all the statements and questionnaires. The results of this study indicate that internal audit, internal control system and audit committee partially affect the implementation of Good Corporate Governance at PT PLN (Persero) UIP Sulawesi. Among the three variables that affect the implementation of Good Corporate Governance at PT PLN (Persero) UIP Sulawesi, audit, internal control system and audit committee have a positive effect.*

**Keywords:** *internal audit, internal control system, audit committee, good corporate governance*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	v
<b>PRAKATA</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	9
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Kegunaan Penelitian .....	10
1.4.1 Kegunaan Teoritis .....	10
1.4.2 Kegunaan Praktis .....	10
1.5 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
2.1 Landasan Teori .....	12
2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) .....	12
2.1.2 Teori Stewardship .....	13
2.1.3 Audit Internal .....	14
2.1.3.1 Pengertian Audit Internal .....	14
2.1.3.2 Fungsi dan Ruang Lingkup Audit Internal .....	15
2.1.3.3 Tujuan Audit Internal .....	16
2.1.3.4 Peran Audit Internal .....	17
2.1.3.5 Wewenang dan Tanggung Jawab Audit Internal .....	17
2.1.4 Sistem Pengendalian Internal .....	18
2.1.4.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal .....	18
2.1.4.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal .....	19
2.1.4.3 Komponen Sistem Pengendalian Internal .....	19
2.1.5 Komite Audit .....	20
2.1.5.1 Pengertian Komite Audit .....	20
2.1.5.2 Struktur Komite Audit .....	21
2.1.5.3 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit .....	22
2.1.5.4 Wewenang Komite Audit .....	22
2.1.6 <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) .....	23
2.1.6.1 Pengertian <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) .....	23
2.1.6.2 Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) .....	24
2.1.6.3 Tujuan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) .....	25
2.1.6.4 Manfaat <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) .....	26
2.2 Penelitian Terdahulu .....	26
2.3 Kerangka Pikir .....	27

2.3 Kerangka Model Penelitian .....	29
2.4 Hipotesis Penelitian.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.1 Rancangan Penelitian .....	34
3.2 Tempat dan Waktu .....	34
3.3 Populasi dan Sampel .....	35
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	37
3.6.1 Variabel Penelitian .....	37
3.6.2 Definisi Operasional.....	37
3.7 Instrumen Penelitian.....	39
3.8 Analisis Data .....	39
3.8.1 Statistik Deskriptif .....	40
3.8.2 Uji Kualitas Data .....	41
3.8.2.1 Uji Validitas .....	41
3.8.2.2 Uji Reliabilitas .....	41
3.8.3 Uji Asumsi Klasik .....	41
3.8.3.1 Uji Normalitas.....	42
3.8.3.2 Uji Multikolinieritas .....	42
3.8.3.3 Uji Heterokedastisitas .....	43
3.8.4 Pengujian Hipotesis .....	43
3.8.4.1 Uji t.....	43
3.8.4.2 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	44
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
4.1 Deskripsi Data.....	45
4.2 Karakteristik Responden .....	45
4.2.1 Jenis Kelamin Responden .....	45
4.2.2 Umur Responden.....	46
4.2.3 Pendidikan Responden.....	46
4.2.4 Lama Bekerja Responden .....	47
4.3 Statistik Deskriptif.....	48
4.4 Uji Kualitas Data .....	49
4.4.1 Uji Validitas .....	49
4.4.2 Uji Reliabilitas .....	51
4.5 Uji Asumsi Klasik.....	52
4.5.1 Uji Normalitas.....	52
4.5.2 Uji Multikolinearitas .....	53
4.5.3 Uji Heteroskedastisitas .....	54
4.6 Uji Hipotesis .....	55
4.6.1 Uji t (Uji Parsial) .....	55
4.6.2 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	57
4.7 Pembahasan Hipotesis .....	59
4.7.1 Pengaruh Audit Internal terhadap Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> .....	59
4.7.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> .....	60

4.7.3 Pengaruh Komite Audit terhadap Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> .....	60
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	62
5.1 Kesimpulan .....	62
5.2 Saran.....	62
5.3 Keterbatasan Penelitian .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	64
<b>LAMPIRAN</b> .....	68

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2022.....	7
4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	45
4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur .....	46
4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	46
4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja.....	47
4.5 Statistik Deskriptif .....	48
4.6 Hasil Uji Validitas.....	49
4.7 Hasil Uji Reliabilitas .....	51
4.8 Hasil Uji Multikolinearitas.....	53
4.9 Hasil Uji t .....	56
4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	58
4.11 Ikhtisar Hasil Pengujian Hipotesis .....	59

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pikir .....	28
2.1 Kerangka Model Penelitian .....	29
4.1 Hasil Uji Normalitas .....	52
4.2 Grafik <i>Scatterplot</i> .....	54

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Biodata .....	69
2 Kuesioner Penelitian .....	70
3 Hasil Uji SPSS.....	77

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian suatu negara menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing perusahaan dan industri yang beroperasi di dalamnya. Indonesia memiliki potensi besar sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara terletak pada kemampuannya dalam memperkuat sektor industri, yang diharapkan akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi negara. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, namun masih diperlukan upaya untuk mengatasi berbagai tantangan agar pertumbuhan ekonomi dapat lebih tinggi dan berkelanjutan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) secara optimal di berbagai sektor industri. Penerapan GCG yang lemah dapat berdampak negatif pada kinerja perusahaan, mengurangi kepercayaan investor, serta berpotensi merugikan kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) perusahaan.

Tantangan dalam penerapan *Good Corporate Governance* menjadi perhatian penting bagi *stakeholder* terutama regulator dan investor. Penerapan GCG saat ini menghadapi banyak tantangan dan hambatan, salah satunya adalah adanya banyak pelanggaran yang terjadi, seperti penyalahgunaan terutama dalam hal pengelolaan keuangan (Mustoffa, 2016). Penerapan GCG yang tidak optimal dapat mengakibatkan berbagai masalah, seperti terjadinya *fraud*, keputusan yang tidak tepat, serta ketidakpastian hukum. Selain itu, masalah penerapan GCG yang tidak optimal dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, serta merugikan



*stakeholders* seperti karyawan, pemegang saham, dan masyarakat luas. Oleh karenanya, implementasi GCG yang baik-menjadi semakin penting untuk mencegah terjadinya masalah dan meningkatkan kinerja perusahaan.

Penerapan GCG menjadi salah satu prioritas penting bagi pemerintah Indonesia, sebagaimana terlihat dari berbagai upaya regulasi dan pengawasan yang dilakukan. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan dan undang-undang terkait GCG, termasuk salah satunya yaitu Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-01/Mbu/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) pada BUMN pasal 2 yang berbunyi: (1) BUMN harus secara konsisten dan berkelanjutan menerapkan GCG sesuai dengan panduan Peraturan Menteri ini serta mematuhi peraturan dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN; dan (2) untuk menerapkan GCG sebagaimana disebutkan pada ayat (1), Direksi akan menyusun GCG manual yang berisi board manual, sistem pengendalian intern, manajemen risiko manual, tata kelola teknologi informasi, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan, serta kode etik (*code of conduct*).

Pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai peraturan dan undang-undang terkait GCG, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Prinsip-prinsip GCG pada BUMN. Selain itu, pemerintah juga memiliki lembaga pengawas khusus untuk memastikan penerapan GCG yang baik di perusahaan-perusahaan, yaitu Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) yang dibentuk pada tahun 2006. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya penerapan GCG dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan keberhasilan perusahaan.

Penerapan GCG dapat menjadi-salah-satu faktor penting bagi kesuksesan dan kelangsungan bisnis suatu perusahaan dalam jangka panjang, serta meningkatkan daya saing di pasar global termasuk pada perusahaan yang berkembang. Selain itu, GCG juga dapat membantu perusahaan mengatasi tantangan-tantangan yang kerap muncul di era bisnis yang semakin kompleks saat ini. Penerapan GCG dalam perusahaan merujuk pada suatu sistem yang memungkinkan perusahaan untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan operasionalnya dengan tujuan menghasilkan nilai tambah, sekaligus memperhatikan kepentingan *stakeholder* seperti asosiasi bisnis, kreditor, konsumen, pemasok, karyawan, masyarakat umum, dan pemerintah. (Hutabarat 2022).

Audit internal yang independen memegang peran yang krusial dalam menjalankan penerapan GCG dengan baik. Fungsi auditor internal yang independen terletak pada pengawasan aktivitas perusahaan dengan memastikan prinsip-prinsip GCG telah diterapkan dengan baik, termasuk akuntabilitas (*accountability*), kemandirian (*independency*), transparansi (*transparency*), kewajaran (*fairness*), dan tanggung jawab (*responsibility*) (Hutabarat 2022; KNKG, 2006).

Audit internal ialah fungsi evaluasi independen yang didirikan di perusahaan untuk mengevaluasi dan menguji kegiatan perusahaan sebagai bentuk pelayanan internal. Tugas audit internal melibatkan aktivitas penelitian independen di dalam organisasi untuk mengevaluasi kembali kegiatan keuangan, akuntansi, dan operasi lainnya yang merupakan dasar dari layanan kepada manajemen (Hery, 2017). Pelaksanaan pengendalian dalam suatu organisasi dapat dilaksanakan oleh anggota internal perusahaan atau melalui departemen

audit internal. Departemen audit internal berperan sebagai penyedia layanan penilaian untuk pengendalian, kinerja, risiko, dan tata kelola perusahaan (Maryani, 2020).

Audit Internal harus menyajikan informasi tentang efektivitas dan kelengkapan sistem pengendalian internal perusahaan. Oleh karenanya, Keberhasilan audit internal dalam pengawasan kegiatan manajemen sangat bergantung pada kemampuan auditor internal di bidang keuangan (Rito, 2018). Selain itu, menurut (Kusmayadi, 2012) peran auditor tidak hanya terbatas pada melakukan *monitoring* dan pengawasan, melainkan juga sebagai konsultan dan katalisator. Oleh sebab itu, peran audit internal tidak hanya terbatas pada *monitoring*, melainkan juga membantu perusahaan dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal.

Audit internal tidak dapat berdiri sendiri dalam penerapan praktik GCG di suatu perusahaan. Penerapan GCG juga perlu didukung oleh sistem pengendalian interna yang efektif agar bisa mencapai tujuannya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, sistem pengendalian internal merupakan proses yang dibuat oleh manajemen untuk memastikan pencapaian tujuan perusahaan, efisiensi operasional, kepatuhan pada peraturan, dan keandalan laporan keuangan.

Sistem pengendalian internal mencakup struktur organisasi, ukuran-ukuran, dan metode yang digunakan dalam perusahaan untuk mengarahkan perusahaan menuju pencapaian tujuan dan program yang diterapkan, serta mempromosikan efisiensi dan ketaatan sesuai dengan kebijakan manajemen. Bastian (2011) mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kinerja organisasi, menjaga keamanan aset dan

catatan keuangan, memeriksa akurasi data akuntansi, serta memperkuat kepatuhan pada kebijakan manajemen.

Selain audit internal dan sistem pengendalian internal, komite audit juga berperan penting dalam keberhasilan penerapan GCG. Komite audit ialah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas dewan komisaris. Untuk mempermudah pemantauan terhadap operasional perusahaan, dewan komisaris membentuk komite audit yang akan berfungsi sebagai penghubung utama antara manajemen perusahaan dengan auditor (Hery, 2017).

Komite audit bertujuan untuk menjamin proses audit dan pengawasan keuangan perusahaan terkendali serta terintegrasi dengan sistem pengendalian internal. Selain itu, komite audit juga berperan sebagai pengawas pekerjaan auditor internal dan eksternal dalam melaksanakan tugasnya, serta memverifikasi bahwa tindakan yang dibutuhkan telah dilakukan untuk menyelesaikan temuan audit dan masalah pengendalian internal. Dengan demikian, komite audit menjadi elemen penting dalam menerapkan praktik GCG, karena dapat membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam mengelola keuangan dan operasionalnya.

Selanjutnya, PT PLN (Persero) UIP Sulawesi yang merupakan unit induk dari PT PLN (Persero). PT PLN (Persero) merupakan BUMN yang bertanggung jawab atas seluruh aspek kelistrikan di Indonesia. Dalam mengelola distribusi listrik, PLN membagi fungsi unit induknya ke dalam beberapa bagian berdasarkan sistem tenaga listrik yaitu pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Tidak hanya itu, terdapat juga unit induk atau pusat-pusat lain yang mendukung operasional perusahaan. Mengingat wilayah kerja PLN yang sangat luas, perusahaan ini

memiliki unit-unit di seluruh Indonesia yang bertugas sesuai dengan fungsi masing-masing unit induknya.

Untuk meningkatkan daya saingnya, dunia bisnis membutuhkan berbagai perangkat. Salah satu perangkat yang sangat bernilai bagi pemegang saham ialah GCG. Perusahaan yang mengimplementasikan GCG dengan efektif dan konsisten lebih bernilai daripada perusahaan yang tidak menerapkannya. Oleh karena itu, para pelaku usaha di Indonesia, termasuk BUMN, menyadari kebutuhan akan penerapan prinsip-prinsip GCG dalam aktivitas bisnisnya.

Sebagai bukti nyata untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG, perusahaan telah menerbitkan dokumen-dokumen pendukung dalam penerapan GCG seperti Pedoman GCG, Board Manual, dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*). Perusahaan menyadari bahwa penerapan GCG saat ini tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban saja, namun telah menjadi kebutuhan dalam menjalankan kegiatan bisnis perusahaan dalam rangka menjaga pertumbuhan usaha secara berkelanjutan, meningkatkan nilai perusahaan dan sebagai upaya agar perusahaan mampu bertahan dalam persaingan.

Dua permasalahan yang fenomenal berkaitan dengan penerapan GCG terlihat pada (1) Temuan BPK; dan (2) Kasus PT PLN (Persero) UIP Sulawesi. Temuan BPK pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2022 menunjukkan bahwa terdapat 9.158 temuan dari 771 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang terdiri dari 682 LHP Keuangan, 41 LHP Kinerja, dan 48 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT). Pada hasil pemeriksaan tersebut, BPK menemukan 9.158 temuan yang mencakup 15.674 permasalahan senilai Rp18,37 triliun. Terdapat 7.020 permasalahan yang terkait dengan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), 8.116 permasalahan yang merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan

peraturan perundang-undangan senilai Rp17,33 triliun, dan 538 permasalahan terkait dengan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp1,04 triliun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2022

15.674 Permasalahan		Pempus	Pemda	BUMN & Badan Lainnya	Total
		<u>Jumlah Permasalahan</u> <u>n</u> Nilai (Rp Juta)	<u>Jumlah Permasalahan</u> <u>n</u> Nilai (Rp Juta)	<u>Jumlah Permasalahan</u> <u>n</u> Nilai (Rp Juta)	<u>Jumlah Permasalahan</u> <u>n</u> Nilai (Rp Juta)
A	Kelemahan SPI	<b>1.188</b>	<b>5.366</b>	<b>466</b>	<b>7.020</b>
B	Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan	<b>1.300</b> 4.949.650,87	<b>6.544</b> 2.358.516,98	<b>272</b> 10.021.614,04	<b>8.116</b> 17.329.781,89
C	Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan dan ketidakefektifan	<b>29</b> 104.423,45	<b>365</b> -	<b>114</b> 941.390,13	<b>538</b> 1.045.813,58
TOTAL A+B+C		<b>2.517</b> 5.054.074,32	<b>12.275</b> 2.358.516,98	<b>882</b> 10.963.004,17	<b>15.674</b> 18.375.595,47

Fenomena lain pada kasus PLN menunjukkan bahwa Kesatuan Aktivistis Mahasiswa Indonesia (KAMI) menyampaikan keprihatinan terkait dugaan pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi gardu induk PLN (LegionNews, 2023). Ketua KAMI, Tangguh Eka B.A.IIham, mengungkapkan bahwa hasil investigasi menemukan kejanggalan dalam kontrak PT PLN (Persero) UIP XIII tahun 2013. Kontraktor, PT. Hilmanindo Signintama dan PT. Trika Putri Permai, diduga melanggar prosedur dengan 14 kali amandemen dan ketidakmampuan menyelesaikan pekerjaan sesuai batas waktu. KAMI juga mencatat perubahan tata cara pembayaran trafo dan keterlambatan pengiriman, serta telah mengirim surat somasi ke PT PLN (Persero) UIP Sulawesi Bagian

Selatan. Mereka berencana melaporkan kejadian ini ke KPK dan mendesak untuk memeriksa pihak terkait, termasuk Direktur Utama PT. CG *Power Systems* Indonesia dan PT. Trika Putri Permai, serta oknum pegawai PLN yang terlibat.

Dengan demikian, dua permasalahan di atas menunjukkan bahwa implementasi *good corporate governance* tidak terlaksana dengan baik, sehingga praktik-praktik yang tidak sehat seringkali terjadi. Pengendalian internal dan peran audit internal harus memberikan dukungan yang maksimal untuk menerapkan GCG dengan baik, terutama di perusahaan BUMN seperti yang diharapkan oleh semua pihak (Gusnardi, 2009).

Selanjutnya beberapa studi yang relevan pada penelitian ini seperti, Mangasih dkk (2020), Putri (2020) dan Pratiwi (2020). Penelitian Mangasih dkk (2020) menyatakan bahwa kualitas audit internal berpengaruh terhadap GCG. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi kualitas audit internal pada perusahaan, semakin baik pula tata kelola perusahaan.

Selanjutnya, penelitian Putri (2020) menemukan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap GCG. Efektifitas pengendalian internal dapat membimbing petugas pelaksana dalam menjalankan operasi yang tepat sasaran dan sejalan dengan penerapan GCG. Jika seluruh komponen pengendalian internal dipenuhi dengan baik, maka dapat menghindari adanya kesalahan atau pelanggaran yang tidak diinginkan. Oleh karenanya, pengendalian internal memainkan peran signifikan dalam mewujudkan GCG dan menghindari risiko kehilangan nilai perusahaan.

Begitu pun dengan temuan penelitian Pratiwi (2020), menegaskan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penerapan *good corporate governance*. Hal tersebut menandakan bahwa ketika komite audit dapat melakukan perannya

dengan baik serta menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik, maka implementasi *good corporate governance* dalam perusahaan semakin baik.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang hanya membahas tentang pengaruh audit internal dan sistem pengendalian internal terhadap GCG seperti dalam penelitian Mangasih dkk (2020). Penelitian ini merupakan modifikasi dari studi sebelumnya, peneliti menambahkan variabel komite audit yang berdasarkan penelitian sebelumnya berpengaruh terhadap GCG. Oleh karenanya, komite audit memainkan peran yang signifikan dalam menerapkan praktik GCG di perusahaan., karena dapat membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam mengelola keuangan dan operasionalnya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari paparan latar belakang masalah, dapat dihasilkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah audit internal berpengaruh terhadap penerapan *good corporate governance*?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap penerapan *good corporate governance*?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penerapan *good corporate governance*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan pada penelitian ini, yaitu:



1. Untuk menguji pengaruh audit internal terhadap penerapan *good corporate governance*?
2. Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian internal terhadap penerapan *good corporate governance*?
3. Untuk menguji pengaruh komite audit terhadap penerapan *good corporate governance*?

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Manfaat dari penelitian akan menunjukkan nilai dan signifikansi penelitian, termasuk bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

1. Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan bukti empiris tentang pengaruh audit internal, sistem pengendalian internal, dan komite audit terhadap penerapan GCG dengan mempertimbangkan teori yang diterapkan dalam penelitian ini.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan penelitian yang akan datang terkait dengan pengaruh variabel-variabel pada penelitian ini.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi praktis dan memberikan wawasan serta rekomendasi bagi PT PLN (Persero) UIP Sulawesi atau perusahaan sejenisnya dalam mengoptimalkan penerapan GCG melalui audit internal, sistem pengendalian internal, dan komite audit.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Pedoman penulisan skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2012) menjadi acuan dalam menyusun sistematika penulisan. Agar lebih mudah dipahami, Penulisan penelitian terdiri dari tiga bab yang terbagi dalam beberapa sub bab. Penjelasan detail dari setiap bab akan diuraikan di bawah ini:

**BAB I:** Bab ini memuat penjelasan tentang latar belakang masalah sebagai dasar dan alasan melakukan penelitian ini, rumusan masalah yang akan dijawab dan diselesaikan melalui penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, kegunaan penelitian bagi pengembangan ilmu dan praktik, serta sistematika penulisan yang akan diikuti pada saat menyusun laporan penelitian. Dengan demikian, bab ini memberikan gambaran umum tentang isi dan tujuan penelitian ini.

**BAB II:** Pada bagian ini akan diuraikan tentang teori-teori dan penelitian terdahulu yang menjadi dasar dari penelitian yang dilakukan. Bab ini juga membahas tentang variabel-variabel yang akan dijadikan objek penelitian, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian yang akan diuji.

**BAB III:** Bab ini berisi penjelasan mengenai rancangan penelitian, termasuk tempat dan waktu penelitian dilakukan, populasi dan sampel yang digunakan, jenis dan sumber data yang diperlukan, teknik pengumpulan data yang digunakan, variabel penelitian yang akan diukur beserta definisi operasionalnya, serta teknik analisis data yang akan diterapkan dalam penelitian ini.

**BAB IV:** Bab ini berisi hasil dari penelitian yang dilakukan.

**BAB V:** Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan bahwa teori keagenan ialah hubungan kontraktual antara satu atau lebih pihak (*principal*) dengan pihak lain (*agent*) untuk memberikan jasa atas nama *principal*, termasuk memberikan kewenangan pengambilan keputusan kepada agen (Damayanti, 2021). Analoginya, manajemen bertindak sebagai agen sementara pemilik perusahaan bertindak sebagai prinsipal, dan keduanya terikat oleh kontrak. Bagian terpenting teori keagenan yaitu bahwa *agent* dan *principal* memiliki pandangan dan maksud yang berbeda. Teori keagenan dan good corporate governance memiliki keterkaitan yang erat.

Teori keagenan menjelaskan bahwa terdapat konflik kepentingan antara manajemen perusahaan (*agent*) dan pemilik perusahaan (*principal*). Dalam konteks ini, auditor internal dapat diibaratkan sebagai *agent* yang bertindak atas nama perusahaan dan pemilik perusahaan dapat diibaratkan sebagai *principal* yang memiliki kepentingan dalam perusahaan. Audit internal, pengendalian sistem internal, dan komite audit membantu menyelesaikan konflik kepentingan ini dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Audit internal memeriksa kelengkapan dan kewajaran laporan keuangan, dan juga sistem pengendalian internal yang digunakan perusahaan. Komite audit dapat memberi rekomendasi dalam mengoptimalkan sistem pengendalian internal. Dengan memastikan bahwa tindakan yang diambil manajemen perusahaan sesuai dengan

kepentingan stakeholders perusahaan, maka implementasi GCG dapat ditingkatkan.

### **2.1.2 Teori *Stewardship***

Teori *stewardship* berawal dari bidang psikologi dan sosial yang dirancang untuk membentuk perilaku yang berfokus pada "sikap pelayanan" (*stewardship*) (Donaldson & Davis, 1991). Teori *stewardship* adalah teori yang memberikan alternatif dari teori agensi dan memberikan prediksi yang berbeda mengenai tata kelola perusahaan yang efektif (Harryanto *et al.*, 2014). Teori *stewardship* menyatakan manajer harus bertindak sesuai kepentingan publik. Manajer harus bertindak dalam kepentingan terbaik pemilik perusahaan dan perusahaan, bukan hanya dalam kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Manajer juga bertindak sebagai pengelola yang bertanggung jawab dan profesional dalam mengelola perusahaan, serta membuat keputusan yang bijaksana untuk upaya mencapai tujuan perusahaan.

Teori *stewardship* pada penelitian ini dapat diterapkan untuk menjelaskan bagaimana audit internal, sistem pengendalian internal, dan komite audit dapat membantu dalam menjalankan manajemen perusahaan dengan memperhatikan kepentingan pemilik perusahaan. Hal ini akan membantu dalam membuat keputusan yang bijaksana untuk meningkatkan nilai perusahaan jangka panjang dan mengurangi risiko kerugian bagi perusahaan.

Penelitian ini juga dapat dijelaskan bahwa sistem pengendalian internal yang efektif akan membantu dalam menjamin bahwa tindakan yang diambil dalam mengelola perusahaan sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan. Serta komite audit dapat memberi rekomendasi untuk peningkatan sistem pengendalian

internal dan memberi penilaian yang objektif dan independen tentang sistem pengendalian internal yang digunakan perusahaan.

### **2.1.3 Audit Internal**

#### **2.1.3.1 Pengertian Audit Internal**

Audit internal adalah sebuah fungsi pengkajian independen yang dibuat oleh manajemen guna memberi pelayanan kepada perusahaan yaitu dengan melakukan *review* terhadap kecukupan sistem pengendalian internal dalam mengarahkan ketepatan, keekonomisan, efisiensi, dan efektifitas penggunaan sumber daya perusahaan (Tugiman 2016).

Hery (2016) mendefinisikan audit internal sebagai seperangkat prosedur dan metode yang dilakukan karyawan perusahaan untuk memverifikasi keakuratan data keuangan dan menjamin bahwa aktivitas perusahaan beroperasi sesuai dengan ketentuan. Fungsi audit internal tidak hanya meningkatkan kepercayaan terhadap informasi yang dihasilkan serta memastikan penerapan kebijakan manajemen yang tepat, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap aset perusahaan serta evaluasi efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

Selanjutnya *American Accounting Association* mengemukakan bahwa audit internal ialah suatu metode yang terstruktur dan objektif untuk mendapatkan dan melakukan evaluasi pada pernyataan tentang transaksi dan peristiwa ekonomi untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang sudah ditentukan. Setelah audit selesai, hasilnya akan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan (Sawyer, 2005).

Oleh karenanya, audit internal adalah sebuah proses pengkajian independen yang dibentuk oleh manajemen untuk memastikan keakuratan dan kecukupan sistem pengendalian internal, memverifikasi keakuratan data

keuangan dan operasi sesuai dengan kebijakan manajemen, dan memastikan bahwa tindakan dan peristiwa ekonomi sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Audit internal juga mencakup perlindungan aset perusahaan dan evaluasi efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Proses ini dilaksanakan secara sistematis dan obyektif untuk menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan.

### **2.1.3.2 Fungsi dan Ruang Lingkup Audit Internal**

Fungsi dari audit internal yaitu untuk Memberikan bantuan kepada manajemen dalam pengambilan keputusan atau tindakan dengan memberikan dasar yang kuat. Mulyadi (2010) mengemukakan bahwa fungsi audit internal yaitu:

- a. Memeriksa dan mengevaluasi sistem pengendalian internal dan keefisienan pelaksanaan tugas organisasi. Oleh karena itu, audit internal bertindak sebagai bentuk pengendalian dengan tujuan untuk menilai dan mengukur tingkat dari elemen pengendalian internal lainnya.
- b. Menilai dan mengkaji efisiensi pelaksanaan tugas dan pengendalian internal organisasi. Sehingga, fungsi audit internal berperan sebagai bentuk pengendalian untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal lainnya. Audit internal memeriksa aktivitas seperti akuntansi, keuangan, dan lainnya dengan cara bebas dan independen, untuk mendukung manajemen untuk menjalankan tanggung jawab. Audit internal menyediakan analisis, komentar, dan rekomendasi penting untuk manajemen yang mencakup seluruh tahap aktivitas perusahaan, tidak hanya pada akuntansi saja.

Lingkup audit internal yang dinyatakan oleh Mulyadi (2010) mencakup evaluasi pelaksanaan tanggung jawab dan penilaian keefektifan sistem pengendalian internal. Oleh karena itu, audit internal mencakup beberapa hal sebagai berikut: (a) Mereviu keandalan (integritas dan reabilitas) informasi finansial dan operasi; (b) Memeriksa kembali beragam sistem untuk menjamin kesesuaiannya dengan berbagai prosedur, rencana, kebijakan, peraturan, dan hukum; (c) Melakukan tinjauan atas beragam cara yang digunakan untuk melindungi dan melakukan verifikasi atas keberadaan aset (d) Mengevaluasi efisiensi dan efektivitas penggunaan berbagai sumber daya; dan (e) Mengevaluasi beragam program dan operasi dalam menentukan konsistensinya..

### **2.1.3.3 Tujuan Audit Internal**

Audit Internal bertujuan untuk memberikan bantuan kepada manajemen perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugas melalui komentar, penilaian, dan analisis terhadap aktivitas audit (Agoes, 2013). Selanjutnya, Hery (2016) menyatakan bahwa tujuan utama dari audit internal adalah memberikan bantuan pada seluruh tim manajemen dalam menjalankan tugas dengan efektif melalui penilaian, analisis, saran, dan komentar obyektif terhadap hal-hal atau kegiatan yang sedang diperiksa.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, auditor dalam melakukan audit internal harus melaksanakan lima kegiatan mencakup: (1) Mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian yang diterapkan pada akuntansi keuangan dan operasi perusahaan; (2) Melakukan pemeriksaan terhadap hubungan antara pelaksana dengan prosedur, rencana, dan kebijakan yang sudah ditentukan; (3) mengevaluasi pengelolaan aset perusahaan dan mencegah kerugian yang mungkin terjadi; (4)

Memeriksa keakuratan data dan catatan perusahaan; (5) Mengevaluasi kinerja para pejabat dalam menjalankan kewajiban yang telah diamanahkan.

#### **2.1.3.4 Peran Audit Internal**

Tugiman (2006) mengemukakan bahwa ada tiga jenis peran yang dijalankan oleh audit internal, yaitu: (1) *Watchdog*; (2) Konsultan; dan (3) Katalis. *Pertama*, *watchdog* yaitu peran audit internal yang telah ada sejak lama, meliputi pekerjaan menginspeksi, mengobservasi, menghitung, melakukan pengecekan, dan verifikasi. *Kedua*, konsultan, melalui perannya, audit internal dapat memberikan saran yang bermanfaat untuk membantu manajer dalam mengelola sumber daya organisasi. *Terakhir*, *ketiga*, katalis yaitu audit internal berperan sebagai katalisator dengan memberikan saran-saran konstruktif kepada manajemen, sehingga membantu kemajuan perusahaan, sambil tetap menjaga independensi audit internal dan tidak turut dalam aktivitas operasional organisasi.

#### **2.1.3.5 Wewenang dan Tanggung Jawab Audit Internal**

*Institute of Internal Audit* (IIA) menyatakan bahwa salah satu kewenangan auditor internal adalah memperoleh akses yang diizinkan terhadap sumber daya, personil, dan catatan yang dibutuhkan untuk melakukan audit dengan tujuan memastikan bahwa tugas audit dapat dilaksanakan dengan efektif. Dengan demikian, auditor internal berhak untuk mengakses sumber daya yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya (Sawyer, 2005).

Auditor internal bertanggung jawab untuk menjalankan program audit internal, memberi arahan kepada staf yang terlibat, serta melakukan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan departemen audit internal. Auditor internal juga



bertanggung jawab untuk rencana audit tahunan untuk semua bagian perusahaan, serta menyajikan program tersebut untuk disetujui. (Tunggal 2012).

## **2.1.4 Sistem Pengendalian Internal**

### **2.1.4.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal**

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 menyatakan bahwa sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang dibuat oleh manajemen untuk menjamin pencapaian efisiensi, efektivitas dan ketaatan pada peraturan yang berlaku. Sistem pengendalian internal juga bertujuan untuk memastikan keandalan laporan keuangan.

*Committee of Sponsoring Organization (COSO) (1992)* menyatakan bahwa sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang dirancang untuk menjamin kepastian yang wajar terkait dengan pencapaian tujuan dalam kategori-kategori seperti, (a) Efisiensi dan efektivitas operasi, (b) Keandalan pada laporan keuangan, dan (c) kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku.

*AICPA (American Institute of Certified Accountants)* menyatakan bahwa sistem pengendalian internal ialah serangkaian rancangan dan tindakan yang diadopsi oleh suatu bisnis untuk meningkatkan efisiensi operasional, memeriksa keakuratan dan keandalan data akuntansi, melindungi asetnya, dan meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan (Moeller, 2009)

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa tidak hanya terbatas pada bidang akuntansi dan keuangan, tetapi mencakup semua aspek kegiatan yang terkait dengan organisasi.

#### **2.1.4.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal**

Tuanakotta (2013) menyatakan bahwa tujuan utama dari sistem pengendalian internal yaitu seperti: (a) Strategis, sasaran-sasaran utama (*high-level goals*) yang menunjang nilai entitas; (b) Pengendalian internal atas pelaporan keuangan; (c) Pengendalian operasional; dan (d) Ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku..

Mulyadi (2002) menyatakan bahwa ada tiga tujuan utama dari sistem pengendalian internal, ialah: (a) Mengevaluasi keandalan informasi keuangan yang disajikan, dengan manajer sebagai penanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan bagi bagi pemangku kepentingan; (b) Menjamin kepatuhan terhadap peraturan dan hukum; (c) Meningkatkan kinerja operasional perusahaan.

#### **2.1.4.3 Komponen Sistem Pengendalian Internal**

COSO (2013) menentukan adanya lima elemen sistem pengendalian internal, sebagai berikut:

1. *Control Environment* (Lingkungan Pengendalian)

Lingkungan pengendalian merujuk pada serangkaian struktur, prosedur, dan standar yang membentuk dasar pelaksanaan sistem pengendalian internal di suatu perusahaan.

2. *Risk Assesment* (Penilaian Risiko)

Dalam proses penilaian risiko, risiko diidentifikasi dan dinilai secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Penilaian risiko menjadi landasan untuk pengelolaan risiko secara efektif.

3. *Control Activities* (Aktivitas Pengendalian)

Tujuan dari aktivitas pengendalian adalah untuk menjamin bahwa langkah yang diarahkan oleh manajemen dalam pengendalian risiko dengan mengikuti prosedur dan kebijakan yang ditetapkan.

#### 4. *Information and Communication* (Informasi dan Komunikasi)

Manajemen mendapatkan dan memanfaatkan informasi yang berkualitas dan relevan dari internal dan eksternal, sebagai dukungan bagi fungsi pengendalian internal lainnya

#### 5. *Monitoring Activities* (Aktivitas pemantauan)

- a. Organisasi memilih, membangun, dan mengevaluasi terus-menerus atau evaluasi terpisah guna menentukan komponen pengendalian internal berjalan optimal.
- b. Organisasi mengevaluasi dan melaporkan kelemahan pengendalian internal dengan cepat kepada pihak yang berkewajiban untuk melakukan tindakan korektif, seperti direksi dan manajemen senior, sesuai dengan kebutuhan.

### **2.1.5 Komite Audit**

#### **2.1.5.1 Pengertian Komite Audit**

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dijelaskan bahwa komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit ialah unsur penting dari hubungan antara auditor dan manajemen perusahaan. Komite tersebut dapat didirikan untuk mendukung dewan komisaris dalam memantau pelaksanaan operasi perusahaan (Hery, 2017).

*Audit Committee Institute* (2013) mendefinisikan komite audit sebagai pengawas yang bertanggung jawab untuk menjamin bahwa sistem pengendalian internal dan laporan keuangan beroperasi secara efektif, meningkatkan praktik etika, dan melakukan penilaian dan estimasi akuntansi dengan benar. Komite audit mendukung dewan dalam menjamin kinerja yang efektif dari operasi perusahaan dan pengelolaan risiko, komite audit berperan dalam memantau audit internal maupun eksternal. Komite audit juga memperhatikan penerapan tata kelola perusahaan yang efektif, dan hasilnya diberikan kepada pemegang saham dan dewan (Damayanti, 2021),

#### **2.1.5.2 Struktur Komite Audit**

Anggota komite audit perlu memenuhi syarat independensi, tidak terkait dengan tugas operasional perusahaan, dan berpengalaman untuk menjalankan tugas dalam mengawasi dengan efektif. Jumlah anggota dapat disesuaikan dengan ukuran dan tanggung jawab organisasi untuk memastikan pengawasan yang tepat dilakukan. Namun, biasanya jumlah yang ideal adalah tiga hingga lima anggota (FCGI, 2012).

Struktur komite audit diatur pada surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 pada pasal 2, yaitu: (a) Komite Audit harus terdiri dari tidak kurang dari 3 anggota yang masing-masing berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari Luar Perusahaan Publik atau Emiten; dan (b) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.

### **2.1.5.3 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit**

Komite Audit memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab yang telah diatur dalam surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 pada pasal 5, yaitu :

- a. mereviu informasi keuangan yang akan disampaikan oleh Perusahaan Publik atau Emiten kepada publik dan/atau pihak otoritas, seperti proyeksi, laporan keuangan, dan laporan lainnya.
- b. Menelaah kepatuhan Perusahaan Publik atau Emiten pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aktivitasnya.
- c. Menyampaikan opini independen jika terdapat perbedaan pandangan antara Akuntan dan manajemen mengenai layanan yang diberikan.
- d. Memberi saran kepada Dewan Komisaris dalam pemilihan Akuntan yang berdasar pada ruang lingkup tugas, independensi, dan fee.
- e. Mengevaluasi pelaksanaan audit internal dan mengawasi tindak lanjut yang diambil oleh Direksi berdasarkan temuan auditor internal.
- f. Mengevaluasi atas implementasi manajemen risiko oleh Direksi, terutama jika tidak ada fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris pada Emiten atau Perusahaan Publik.
- g. Meninjau aduan terkait dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan Publik atau Emiten.
- h. Melakukan peninjauan dan memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kemungkinan terjadinya benturan kepentingan dalam kegiatan Perusahaan Publik atau Emiten.
- i. Melindungi kerahasiaan informasi, data, dan dokumen Perusahaan Publik atau Emiten.

### **2.1.5.4 Wewenang Komite Audit**

Komite audit memiliki wewenang yang sudah diatur dalam surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 pada pasal 6, yaitu: (a) Mendapatkan akses ke informasi, data, dan dokumen tentang aset, dana, karyawan, dan sumber daya perusahaan yang dibutuhkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik; (b) Melakukan komunikasi langsung dengan karyawan perusahaan, termasuk Direksi dan staf audit internal, manajemen risiko, dan akuntan, terkait pelaksanaan tanggung jawab dan tugas Komite Audit; (c) Membawa pihak independen dari luar Komite Audit yang dibutuhkan untuk

membantu dalam melakukan tugas (jika diperlukan); (d) Melaksanakan wewenang tambahan yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris.

## **2.1.6 Good Corporate Governance (GCG)**

### **2.1.6.1 Pengertian *Good Corporate Governance***

*Forum Corporate Governance in Indonesian* menyatakan bahwa *good corporate governance* ialah seperangkat aturan yang mengontrol interaksi antara berbagai pihak yang terlibat dengan perusahaan, seperti manajemen, karyawan, pemegang saham, kreditur, serta *stakeholder*, dalam hal hak dan kewajiban (Hery, 2010).

Sutedi (2011) mendefinisikan GCG sebagai sebuah proses dan kerangka kerja yang diterapkan oleh suatu organisasi yang melibatkan pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi, untuk mengoptimalkan akuntabilitas dan keberlanjutan bisnis, serta memperhatikan kepentingan semua *stakeholder*, dengan mematuhi aturan hukum dan prinsip-prinsip etika.

Oleh karenanya, GCG merupakan serangkaian aturan dan proses yang mengelola seluruh pihak yang terkait dengan sebuah organisasi atau perusahaan, seperti pemegang saham, manajemen, direksi, karyawan, pihak kreditur, pemerintah, dan *stakeholders* lainnya. GCG bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kesuksesan usaha perusahaan, serta memperhatikan kepentingan semua *stakeholders* dengan mematuhi aturan hukum dan prinsip-prinsip etika.

### 2.1.6.2 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2006) di Indonesia mengemukakan *good corporate governance* tidak terdiri dari peraturan hukum, tetapi berisi prinsip-prinsip penting yang seharusnya menjadi dasar bagi perusahaan yang berorientasi masa depan dan beroperasi sesuai dengan nilai-nilai bisnis.

KNKG dalam pedoman ini mengemukakan 5 prinsip dalam menerapkan GCG yaitu:

1. *Transparansi (Transparency)*

Upaya menjaga netralitas dalam bisnis dapat dilakukan dengan memberikan informasi material yang mudah dipahami dan dijangkau oleh pihak-pihak terkait perusahaan.

2. *Akuntabilitas (Accountability)*

Perusahaan perlu dijalankan dengan efektif dan terukur, dengan mempertimbangkan kepentingan para *stakeholder* serta pihak terkait lainnya dan tetap memenuhi kebutuhan perusahaan.

3. *Pertanggungjawaban (Responsibility)*

Perusahaan wajib mengikuti regulasi dan hukum serta menjalankan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.

4. *Kemandirian (Independency)*

Perusahaan mesti memastikan bahwa setiap bagian dalam organisasi bekerja secara mandiri dan tidak dipengaruhi pihak luar.

5. *Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)*

Perusahaan memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil selalu menjaga kepentingan pemilik saham, serta pihak yang terkait dengan cara wajar dan adil.

Prinsip-prinsip GCG di atas dapat berkontribusi secara positif terhadap perusahaan. dan pihak-pihak yang terkait. Diterapkannya prinsip-prinsip ini membantu untuk mengidentifikasi potensi risiko yang muncul dari kegiatan bisnis perusahaan (Maulidyyah *et al.*, 2017)

### **2.1.6.3 Tujuan *Good Corporate Governance***

Arief Effendi (2016) sesuai dengan Pasal 4 dari Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN, penerapan praktik-praktik GCG bertujuan:

1. Menjaga kelangsungan hidup dan mencapai tujuan BUMN, nilai-nilai harus dioptimalkan agar perusahaan dapat bersaing dengan kuat di level domestik dan internasional.
2. Mendorong manajemen BUMN yang efektif, efisien, dan profesional, sambil memperkuat fungsinya dan mengoptimalkan kemandirian
3. Membantu Organ Perum/Organ Persero untuk mengambil keputusan dan bertindak dengan moralitas yang tinggi, mematuhi hukum dan peraturan, serta mempertimbangkan tanggung jawab sosial BUMN terhadap lingkungan dan pihak yang berkepentingan
4. Memperkuat peran serta BUMN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
5. Mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung untuk pertumbuhan investasi dalam skala nasional.



#### **2.1.6.4 Manfaat *Good Corporate Governance***

*Forum for Corporate Governance in Indonesian* (2005) menyatakan ada beberapa manfaat dari implementai GCG, seperti: (a) Lebih mudah; (b) Biaya modal yang lebih rendah; (c) Meningkatkan kinerja bisnis; (d) Memperbaiki harga saham; dan (e) Meningkatkan kinerja perekonomian.

### **2.2 Penelitian Terdahulu**

Beberapa Penelitian yang relevan seperti: (Mangasih dkk, 2020); (Arifudin dkk, 2020); (Putri, 2020); (Pratiwi, 2021); (Maryana dan Hasibuan, 2020). Penelitian (Mangasih dkk, 2020) menemukan bahwa kualitas audit internal dan efektivitas sistem pengendalian internal masing-masing berpengaruh positif terhadap variabel GCG.

Selanjutnya (Arifudin dkk, 2020) meneliti pengaruh sistem pengendalian internal dan audit internal terhadap GCG. Responden dalam Penelitian ini yaitu internal auditor pada BUMD dan BUMN di Bandung. Temuan penelitian tersebut menyatakan bahwa bahwa audit internal dan sistem pengendalian internal masing-masing berpengaruh terhadap pelaksanaan GCG.

Penelitian lain (Putri, 2020) ditujukan untuk memaham pengaruh audit internal dan pengendalian internal terhadap GCG. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kuantitatif sebagai cara melakukan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa audit internal dan pengendalian internal baik secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap GCG.

Selanjutnya, (Pratiwi, 2021) menguji pengaruh peran komite audit dan audit internal terhadap penerapan *good corporate governance*. Temuan penelitian ini

mengindikasikan bahwa komite audit dan audit internal memiliki pengaruh positif terhadap GCG. Begitu pula dengan (Maryana dan Hasibuan, 2020) yang menemukan bahwa audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap GCG.

### **2.3 Kerangka Pikir**

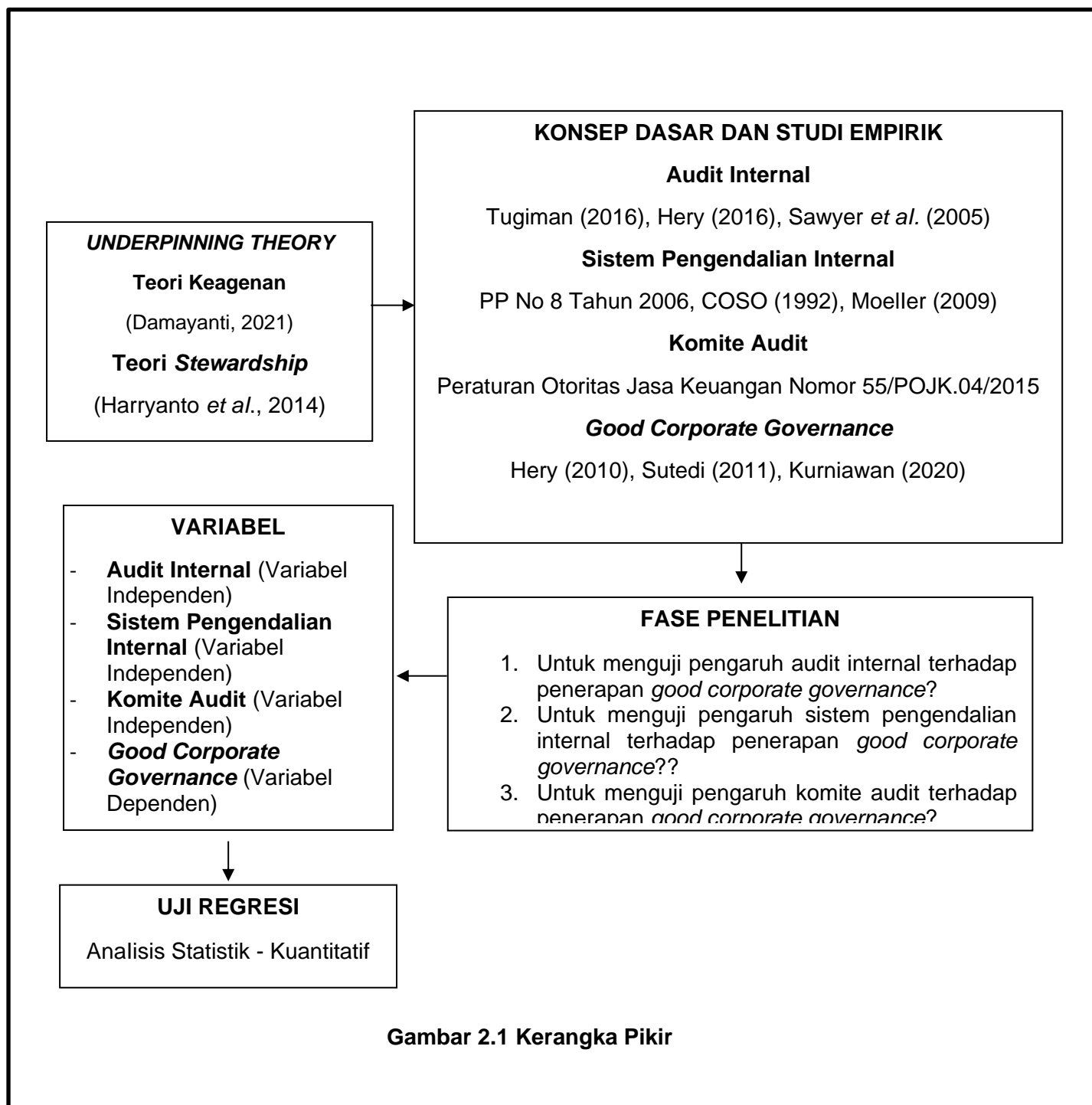
*Good Corporate Governance* (GCG) ialah suatu sistem yang memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan baik, serta bertanggung jawab terhadap pemangku kepentingan. Dalam menjalankan GCG, banyak faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah audit internal, sistem pengendalian internal, dan komite audit.

Audit internal memiliki peran penting dalam menjamin efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal. Audit internal melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi pada proses bisnis perusahaan untuk menjamin sistem pengendalian internal berjalan secara efektif dan memenuhi standar yang ditentukan. Sistem pengendalian Internal berperan untuk mencegah terjadinya kegagalan bisnis dan melindungi kepentingan *stakeholder* perusahaan. Sistem pengendalian internal yang baik menjamin tindakan dan keputusan bisnis dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prinsip GCG. Komite audit memiliki peran sebagai pengawas dan pengontrol implementasi GCG di perusahaan. Komite audit menjamin perusahaan mematuhi standar dan regulasi, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa audit internal, sistem pengendalian internal, dan komite audit mempunyai hubungan erat dan saling memiliki pengaruh satu sama lain dalam mewujudkan penerapan GCG yang baik. Audit Internal memastikan kinerja sistem pengendalian internal, sistem

pengendalian internal menjamin tindakan bisnis sesuai dengan prinsip GCG, dan komite audit memastikan implementasi GCG di perusahaan.

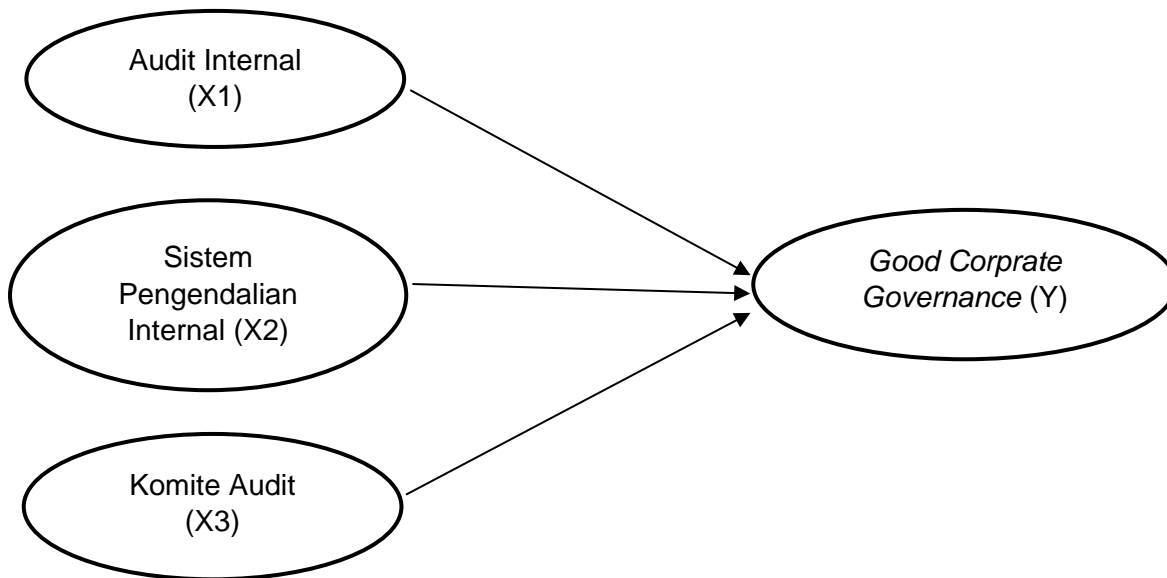
Kerangka pikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

## 2.4 Kerangka Model Penelitian

Adapun model kerangka model pada penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Model Penelitian

## 2.5 Hipotesis Penelitian

### a. Pengaruh Audit Internal terhadap penerapan *Good Corporate Governance*

Teori keagenan mengatakan bahwa ada konflik kepentingan antara manajemen perusahaan (*agent*) dan pemilik perusahaan (*principal*). Dalam konteks ini, auditor internal dapat diibaratkan sebagai *agent* yang bertindak atas nama perusahaan dan pemilik perusahaan dapat diibaratkan sebagai *principal* yang memiliki kepentingan dalam perusahaan. Audit internal membantu menyelesaikan konflik kepentingan ini dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Audit internal memeriksa kelengkapan dan kewajaran laporan keuangan serta sistem pengendalian internal yang digunakan perusahaan.

Selanjutnya teori stewardship dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana audit internal dapat membantu dalam mengatur perusahaan sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan. Hal ini akan membantu dalam membuat keputusan yang bijaksana untuk meningkatkan nilai perusahaan jangka panjang dan mengurangi risiko kerugian bagi perusahyangan.

Audit internal memiliki hubungan erat dengan GCG, sebagai bagian dari perusahaan yang memahami operasi perusahaan secara rutin, audit internal memastikan bahwa tujuan dan sasaran perusahaan dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip GCG. Adanya audit internal yang independen sangat krusial untuk menjamin bahwa prinsip GCG diterapkan dengan baik dan meminimalisir masalah yang timbul dalam perusahaan. Ada indikasi bahwa perusahaan tidak menerapkan prinsip dan mekanisme tata kelola yang baik jika masalah terjadi. Oleh karenanya, audit internal sangat berperan untuk mendukung implementasi paktik GCG di perusahaan (Putri, 2020).

Merujuk pada penelitian sebelumnya (Arifudin dkk, 2020) tentang pengaruh audit internal dan sistem pengendalian internal terhadap penerapan GCG, mengindikasikan audit internal memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan GCG. Auditor internal memiliki peran penting dalam mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan tidak jujur dan memberikan dukungan pada manajemen untuk mencapai sasaran perusahaan. Auditor internal dianggap berperan pengawasan yang efektif dan sangat krusial dalam menjaga kualitas dan transparansi operasi perusahaan. Dari penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Audit Internal Berpengaruh Positif Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance*.

## **b. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap penerapan *Good Corporate Governance***

Teori keagenan mengatakan bahwa ada konflik kepentingan antara manajemen perusahaan (*agent*) dan pemilik perusahaan (*principal*). Sistem pengendalian internal yang baik dapat membantu perusahaan mengatasi masalah *agent-principal* sehingga dapat mencapai tujuan GCG yang lebih baik. Selanjutnya teori *stewardship* menyatakan bahwa sistem pengendalian internal yang efektif dapat membantu dalam menjamin bahwa tindakan yang diambil dalam mengelola perusahaan sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan.

Sistem pengendalian internal memainkan peran penting dalam menerapkan GCG karena membantu perusahaan dalam menjamin efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, serta memastikan bahwa proses bisnis berjalan dengan transparan dan akuntabel. Sistem pengendalian internal yang baik memungkinkan perusahaan untuk menjamin tindakan yang diambil sejalan dengan tujuannya dan meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. Ini membantu perusahaan dalam memastikan bahwa praktik bisnis yang dilaksanakan sejalan dengan standar yang ditentukan, dan memperkuat penerapan GCG.

Penelitian Mangasih dkk (2020) mengungkapkan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap GCG. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin efektif sistem pengendalian internal, maka GCG semakin baik. Sistem pengendalian internal memberi jaminan bahwa laporan keuangan dan operasi dapat dilakukan baik dan efisien, serta sesuai regulasi yang berlaku (Gusnardi, 2011). Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap penerapan *Good Corporate Governance*

**c. Komite audit terhadap penerapan *Good Corporate Governance***

Teori keagenan mengatakan bahwa ada konflik kepentingan antara manajemen perusahaan (*agent*) dan pemilik perusahaan (*principal*). Komite audit bertanggung jawab menjaga kepercayaan dan kepentingan pemilik perusahaan dan pemegang saham. Begitu pula teori *stewardship* menyatakan bahwa komite audit dapat membantu dalam mengatur dan mengelola perusahaan sejalan dengan kepentingan pemilik perusahaan. Komite audit dapat memberi saran untuk peningkatan sistem pengendalian internal, serta pendapat yang objektif dan independen tentang sistem pengendalian internal yang digunakan.

Komite audit bertanggung jawab untuk melaksanakan *review* atas laporan keuangan dan praktik bisnis perusahaan, serta memberikan rekomendasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengendalian internal. Dengan demikian, komite audit sangat berperan untuk memastikan penerapan GCG yang baik, karena mempunyai akses yang luas ke informasi dan data perusahaan dan dapat memantau aktivitas perusahaan secara independen. Komite audit juga dapat memberikan masukan dan rekomendasi untuk meningkatkan praktik bisnis dan sistem pengendalian internal perusahaan, sehingga membantu memastikan penerapan GCG yang baik.

Penelitian sebelumnya telah menemukan bahwa komite audit dan pelaksanaan GCG memiliki hubungan positif. Pratiwi (2021) mengemukakan bahwa ini mengindikasikan bahwa komite audit dan audit internal memiliki pengaruh positif terhadap GCG. Semakin baik komite audit dalam melaksanakan tugasnya, semakin baik pula penerapan GCG dalam organisasi tersebut.

Hubungan antara komite audit dan GCG sangat penting dalam menjamin kualitas pengendalian dan transparansi dalam suatu organisasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3: Komite audit berpengaruh positif terhadap penerapan *Good Corporate Governance*